BAB III

IMPLIKASI PERBEDAAN DEFINISI KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PROTOKOL PALERMO DALAM PRAKTIK

A. Contoh Kasus Perdagangan Anak

Pada Agustus 2014, peristiwa perdagangan anak terjadi pada dua anak perempuan yaitu XX (inisial samaran), perempuan, 14 tahun, serta YY (inisial samaran), perempuan, 13 tahun. Keduanya masih berstatus sebagai pelajar di Kota Bandung, yaitu XX adalah pelajar SMP serta YY adalah pelajar SD. XX berasal dari keluarga menengah ke bawah dan hanya diasuh oleh seorang ayah. Sehari-harinya XX sering ogah-ogahan bersekolah. Sedangkan YY adalah pelajar kelas 6 SD yang sering kabur dari rumah. Korban tinggal di kawasan kumuh di dekat Pasar Andir, Kota Bandung.

Pelaku, BY (inisial samaran), tinggal di dekat Pasar Andir. Awalnya, kedua korban mengetahui aktivitas BY yang sering merekrut orang-orang sekitar bekerja di luar kota. Suatu hari, XX dan YY meminta agar dicarikan pekerjaan oleh BY. BY kemudian menyampaikan kepada kedua anak tersebut bahwa ada lowongan bekerja di sebuah karaoke di Bangka Belitung dengan gaji yang tinggi. Kedua korban tertarik karena keduanya tidak betah dengan situasi mereka saat itu

(tidak ada perhatian cukup dari orang tua serta situasi kemiskinan dan kumuhnya tempat tinggal mereka). Kedua korban akhirnya menyanggupi tawaran pekerjaan tersebut. Mereka berangkat ke Bangka Belitung tanpa diketahui oleh orang tua atau pihak keluarga mereka. Di tempat bekerja, keduanya diberi tugas untuk menemani pengunjung karaoke.

B. Rekapitulasi Kasus Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat

Berikut adalah rekapitulasi kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat pada periode 2010-2015.

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	
			Proses/Sidik	Selesai/P-21
1.	2010	33	18	15
2.	2011	65	35	30
3.	2012	24	13	11
4.	2013	26	1	25
5.	2014	15	9	6
6.	2015	7	4	3

Jumlah	170	80	90
--------	-----	----	----

C. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat

a. Wawancara Pertama dengan Polda Jawa Barat

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada narasumber dari Polda Jawa Barat. Pada wawancara pertama, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar peran kepolisian dalam penegakan hukum pada kasus-kasus perdagangan orang.

Terkait persepsi anggota kepolisian tentang peran polisi sebagai penegak hukum pada kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang, narasumber menyatakan bahwa aparat polisi menangani dari segi pidana, yaitu polisi menangani tersangka perdagangan orang. Kepolisian menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan persoalan kekerasan terhadap perempuan dengan dikeluarkannya Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Saat ini, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat telah membentuk Sub Direktorat Renakta yang membawahi 5 unit yaitu unit 1 untuk menangani anak berhadapan dengan hukum, unit 2 tentang perdagangan orang dan *people smuggling*, unit 3 tentang tindakan asusila,

unit 4 tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), unit 5 tentang masalah ketenagakerjaan.

Melanjutkan penjelasannya, narasumber dari Polda Jawa Barat menyatakan dukungan penuh Kepolisian RI terkait implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun masih banyak kendala internal dan eksternal yang dihadapi. Kendala internal adalah masalah kebijakan dari pimpinan, masalah dana, sarana, prasarana dan kendala sumber daya manusia. Salah satu kendala eksternal adalah dari sisi korban. Saat ini ada kecenderungan korban perdagangan orang tidak menyadari bahwa dirinya terjerat dalam kasus perdagangan orang. Sebagai contoh, narasumber menjelaskan bahwa pada tahun 2014, Polda Jawa Barat menangani kasus perdagangan anak yang menimpa 2 korban anak. Dalam upayanya menegakkan hukum, penyidik Polda Jawa Barat turut menggunakan UU Perlindungan Anak di samping Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mengupayakan agar terpenuhi unsur “cara”. Dalam beberapa kasus, penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena faktor korbannya sendiri. Setelah menjalani proses rehabilitasi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), penyidik menemukan fakta bahwa korban anak sudah mengetahui mengenai pekerjaan yang akan dilakukannya, tidak ada penculikan dan korban menginginkan pekerjaan itu.

Penulis menanyakan lebih rinci mengenai terpenuhinya unsur “cara” dalam kasus-kasus yang pernah ditangani narasumber. Menurut narasumber, jika mengacu kepada unsur cara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat kemungkinan penyidik tidak dapat menjerat kejahatan tersebut sebagai perdagangan orang.

Selain itu, ada perbedaan pemahaman eksploitasi antara pihak penyidik dan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU memahami eksploitasi terjadi jika ada eksploitasi seksual, atau pada saat anak tidak diberikan makanan sedikit pun. Bagi penyidik, eksploitasi terjadi ketika korban berusia di bawah 18 tahun dan dipekerjakan di kafe dengan jam kerja dan kriteria kerja yang tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam sebuah kasus yang pernah ditangani Polda Jawa Barat, jam kerja korban anak adalah dari malam hingga pagi hari. Hal ini dikategorikan sebagai eksploitasi karena pekerja masih berada di bawah usia 18 tahun. Menurut narasumber, unsur “cara” dalam kasus tersebut terkesan tidak dapat dipenuhi, karena tidak terjadi penipuan pada kasus tersebut. Penyidik berusaha membuktikan unsur “cara” tersebut yaitu dengan menunjukkan bahwa pelaku melakukan “bujuk rayu”. Penyidik berusaha menunjukkan bukti bahwa perekrut menjanjikan gaji tertentu kepada korban anak. Dengan begitu, terdapat unsur “cara” yaitu cara kebohongan dan penipuan. Penyidik juga tidak lupa menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam berkas penyidikan mereka.

Narasumber menerangkan lebih lanjut bahwa dalam kasus pada tahun-tahun terakhir, korban, termasuk korban anak, berangkat bekerja keluar daerah dengan pengetahuan yang cukup mengenai pekerjaan dan penghasilan yang akan diperoleh. Narasumber lebih lanjut mengungkapkan bahwa mengacu kepada definisi perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, persetujuan korban tidak menghapuskan tindak pidana selama unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang terpenuhi, yaitu unsur proses, cara dan tujuan eksploitasi. Narasumber memberikan contoh ketika seorang korban dijanjikan akan mendapat uang tip Rp. 100.000 per hari. Dalam banyak kasus, korban tidak menerima uang tip yang dijanjikan seutuhnya karena sebagian diambil oleh *trafficker* dengan dalih untuk menutupi biaya transportasi korban dari desa ke lokasi dia bekerja. Menurut narasumber, pada saat itulah terjadi eksploitasi ekonomi yang ditunjukkan dengan adanya unsur “tujuan eksploitasi”. Korban bekerja namun jumlah penghasilan yang ia dapat hanya Rp 25.000 dari Rp. 100.000 yang dijanjikan. Walaupun ada persetujuan korban, kasus tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang sepanjang ketiga unsur perdagangan orang terpenuhi.

Dalam proses penyidikan, terdapat kendala dalam proses pembuktian. Salah satu kendalanya adalah sikap korban yang tidak kooperatif dalam proses penyidikan. Narasumber menceritakan contoh sebuah kasus dimana korban perdagangan orang justru menghilang pada saat penyidikan masih berlangsung. Dalam kasus yang lain, korban perdagangan orang kembali

bekerja ke luar negeri tanpa menunggu berakhirnya proses penyidikan. Hal ini tentu saja menimbulkan kesulitan penyidik khususnya dalam mengidentifikasi dan menangkap tersangka kasus perdagangan orang, dimana informasi tersebut sangat bergantung kepada keterangan korban.

Kendala lain adalah belum adanya kesamaan persepsi antara penyidik dan JPU. Misalnya perbedaan persepsi tentang unsur eksploitasi. Pada sebuah kasus yang ditangani Polda Jawa Barat pada tahun 2014, penyidik menguraikan bukti eksploitasi melalui buku daftar pegawai yang mencantumkan nama korban dan jam-jam kerja korban. Namun, JPU meminta dibuktikan lebih riil lagi mengenai unsur eksploitasi, misalnya baju yang dikenakan korban (diasumsikan baju minim). Sementara bagi penyidik, bagi korban anak, ketika korban dipekerjakan dengan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini sudah memenuhi unsur eksploitasi. Hingga saat ini, pihak Kejaksaan tidak pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat.

Kendala selanjutnya adalah masalah biaya penyelidikan dan penyidikan. Menurut narasumber, dalam sebuah direktorat di Polda Jawa Barat, anggaran penyidikan dan penyelidikan yang diperoleh adalah hanya untuk sejumlah 97 perkara. Besar anggaran ini tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani. Untuk menyelidiki dan menyidik kasus-kasus kriminal umum pun Polda Jawa Barat mengalami kekurangan biaya. Sedangkan untuk kasus-

kasus perdagangan orang, biaya penyidikan jauh lebih besar. Biaya ini mencakup biaya penjemputan korban, serta biaya untuk mengejar dan menangkap tersangka. Biaya ini terbilang besar, khususnya jika tersangka berada di luar provinsi Jawa Barat.

Terkait dengan kendala sarana pada proses penegakan hukum kasus perdagangan orang, salah satu kendalanya adalah kurangnya fasilitas seperti ruang pelayanan, ruang pemeriksaan, ruang konseling, ruang pemeriksaan medis, bahkan ruang istirahat bagi korban. Untuk menyasati kondisi ini, pada saat penyidik memeriksa korban, petugas lain diminta keluar ruangan. Untuk menyasati tenaga pendamping yang minim, Polda Jawa Barat bekerja sama dengan P2TP2A Jawa Barat, Dinas Sosial Jawa Barat dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat.

Terkait dengan manajemen dan keorganisasian kepolisian dalam penegakan hukum mengenai perdagangan orang, kasus perdagangan orang ditangani di Unit 2 Subdit Renakta yaitu sebuah unit khusus menangani kasus perdagangan orang dan *people smuggling*. Di unit tersebut ada enam orang personil dan satu orang kepala unit. Ketika diminta pendapatnya mengenai kecukupan jumlah personel ini, narasumber menyatakan bahwa jumlah tersebut sebenarnya telah sesuai untuk menangani kasus-kasus perdagangan orang. Namun, seringkali tenaga penyidik pada unit tersebut diperbantukan pula untuk menangani tindak kriminal umum lainnya. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya penyidikan kasus.

Terkait dengan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas tenaga penyidik, Polda Jawa Barat tidak memberikan pelatihan khusus mengenai perdagangan orang kepada tenaga penyidik di institusi tersebut. Pelatihan khusus mengenai perdagangan orang diselenggarakan oleh institusi lain seperti *International Organization for Migration* dan Polda Jawa Barat diberi kesempatan untuk mengirimkan tenaga penyidiknya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Di samping itu, penyidik di Polda Jawa Barat telah mengikuti Pendidikan Kejuruan Reserse Bidang Perdagangan Orang yang diselenggarakan oleh Kepolisian RI di tingkat nasional. Materi mengenai perdagangan orang menjadi salah satu materi yang diajarkan dalam Pendidikan Kejuruan ini.

Terkait faktor masyarakat dalam efektivitas penegakan hukum pada kasus perdagangan orang, narasumber menjelaskan bahwa kesadaran hukum pada kalangan masyarakat perkotaan sudah tinggi. Namun, kesadaran hukum pada kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, masih terbilang rendah. Sebagai contoh, narasumber menyoroti masih rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat di daerah pantai utara Jawa Barat. Narasumber menungkapkan pengalamannya dimana pada saat polisi memulai penyidikan, korban justru merasa enggan. Korban sering kali merasa tidak perlu mempermasalahkan kasus perdagangan orang lebih lanjut. Ada keterdesakan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka enggan melapor. Narasumber juga berpendapat bahwa pengaruh faktor budaya di beberapa

tempat di Jawa Barat khususnya di masyarakat dengan budaya yang permisif kepada perilaku perdagangan anak.

Dalam wawancara ini, penulis turut mengajukan pertanyaan mengenai upaya kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelidiki kasus perdagangan orang secara proaktif tanpa didahului adanya laporan dari pelapor maupun korban, sebagai upaya untuk mencegah ketergantungan polisi terhadap kesediaan korban untuk melapor. Narasumber mengakui sulitnya kepolisian melakukan proses penyelidikan tanpa didahului surat perintah tugas yang didasari adanya laporan polisi atau laporan pengaduan. Tanpa surat perintah tugas, ketika dibutuhkan wawancara untuk kepentingan penyelidikan (misalnya mencari informasi dari warga setempat, ketua lingkungan, dsb), hal ini akan mempersulit polisi karena masyarakat cenderung tidak mau melayani pertanyaan-pertanyaan polisi. Mekanisme penyidikan ini tercantum dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Menurut narasumber, kebijakan tentang kelengkapan administrasi penyidikan memang kadang dirasakan menambah rentetan panjang birokrasi dan merugikan korban.

Narasumber menambahkan bahwa kepolisian menerapkan upaya preventif untuk menjangkau kasus-kasus dimana korban tidak dapat melapor terlebih dahulu. Polda Jawa Barat biasanya bekerja sama dengan pelaksanaan operasi yustisi yaitu melakukan operasi ke tempat-tempat hiburan atau lokasi-lokasi rawan terjadinya perdagangan orang. Polda Jawa Barat mengalami kendala melaksanakan upaya preventif di luar wilayah Jawa Barat karena

faktor biaya. Jika diperoleh informasi tentang kemungkinan adanya peristiwa perdagangan orang, maka Polda Jawa Barat menghubungi Polres setempat sehingga Polres setempat akan menindaklanjutinya.

Terkait diskresi, untuk kasus perdagangan orang, menurut narasumber, ketika tersangka, saksi, korban, dan barang bukti ada, dan ketiga unsur terpenuhi, tidak mungkin kepolisian menerapkan diskresi. Apalagi jika korban adalah anak. Kepolisian memang pernah menemukan situasi dimana korban ada tetapi pelaku tidak ada. Korban tidak bisa menunjukkan identitas tersangka. Misalnya, korban hanya bisa menyebutkan nama tersangka namun tidak bisa menunjukkan posisi atau alamat tersangka. Ketika polisi menemukan kondisi seperti ini, polisi akan coba tetap menangani tapi polisi akan terkendala dengan tidak adanya tersangka. Dalam kasus-kasus demikian, polisi menempuh langkah dengan menghentikan penyelidikan. Ini dipandang bukan diskresi kepolisian. Dalam kasus perdagangan orang, jarang ada diskresi. Dalam kasus perdagangan orang, menurut narasumber, tidak boleh ada upaya diskresi kepolisian karena perdagangan orang adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

b. Wawancara Kedua dengan Polda Jawa Barat

Pada wawancara kedua, penulis melakukan wawancara dengan Polda Jawa Barat. Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar peran kepolisian dalam perlindungan korban perdagangan orang.

Dalam mempersepsikan institusi kepolisian sebagai pihak yang memberi perlindungan kepada korban perdagangan orang, kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat memberikan perhatian kepada fungsi penyedia layanan konseling kepada korban. Polda Jawa Barat mengoptimalkan kerja jejaring dengan lembaga penyedia layanan lain, salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat. Dalam kasus-kasus yang menimpa anak, termasuk perdagangan anak, polisi akan melibatkan pendamping dari LPA Jawa Barat. Selain itu, untuk mengupayakan adanya ruang khusus bagi korban anak ketika menjalani proses pemeriksaan, Polda Jawa Barat berupaya meniasati minimnya ruangan dengan cara membawa anak ke sebuah ruang yang dikosongkan sehingga anak tidak merasa terintimidasi.

Terkait tenaga konselor, narasumber menjelaskan bahwa Polda Jawa Barat mempunyai tenaga konselor yang berasal dari bagian Psikologi Polda Jawa Barat. Namun, tenaga psikolog tersebut tidak mendapat pelatihan khusus tentang pendampingan kepada anak korban perdagangan orang.

Polda Jawa Barat mengupayakan membangun atmosfer ramah anak agar anak tetap nyaman dalam menjalani proses penyidikan. Sebagai contoh, dengan memasang boneka di ruangan terkait. Polda Jawa Barat mencoba untuk tidak kaku dalam menjalankan pemeriksaan penyidikan. Ketika korban anak sedang ditampung di LPA, polisi akan mendatangi LPA untuk menjalankan proses penyidikan. Proses pemeriksaan kepada anak dilakukan pula sambil anak bermain. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kesan menginterogasi kepada anak. Dalam memberikan layanan perlindungan

kepada korban dan saksi anak, Polda Jawa Barat berjejaring dengan lembaga swadaya masyarakat seperti *International Organization for Migration*, Yayasan Bahtera, dan Lembaga Advokasi Hak Anak. Dalam memberikan perlindungan kepada korban, Polda Jawa Barat turut bersinergi dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan kewajiban perlindungan korban yang telah dimandatkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Polda Jawa Barat memiliki keterbatasan karena tidak memiliki rumah aman khusus. Namun, Polda Jawa Barat bekerja sama dengan LPA Jawa Barat dan P2TP2A Jawa Barat. Korban yang membutuhkan perlindungan di rumah aman akan dirujuk ke kedua lembaga tersebut.

Salah satu bentuk perlindungan korban adalah pemberian restitusi kepada korban. Terkait restitusi, Polda Jawa Barat selalu mengupayakan kepada para penyidik untuk memunculkan pertanyaan untuk mengetahui apakah korban menderita kerugian psikis dan fisik, termasuk jumlah nominal dari kerugian tersebut. Jika tidak ada pertanyaan penyidik, jaksa tidak dapat memunculkan gugatan restitusi. Namun, hingga saat ini, Polda Jawa Barat belum pernah menangani korban yang mengajukan restitusi. Narasumber pernah memonitor sebuah kasus yang dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan, dimana korban mengajukan gugatan restitusi. Menurut narasumber, munculnya gugatan restitusi diakibatkan penyidik yang telah memunculkan pertanyaan tentang kerugian korban pada proses penyidikan. Pada akhirnya, dalam kasus

tersebut, tersangka lebih memilih hukuman kurungan selama 1 hingga 3 bulan sebagaimana dimungkinkan oleh UU PTPPO. Menurut narasumber, tidak adanya pengajuan restitusi diakibatkan pula karena korban yang mencabut laporan kasus.

Menurut narasumber, kasus perdagangan orang termasuk kasus yang cukup sering mengalami penghentian penyidikan akibat kurangnya bukti. Narasumber memberikan contoh sebuah kasus perdagangan orang dengan modus penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal. Polisi mengalami hambatan dalam menyidik kasus tersebut karena pada saat penyidikan berlangsung, korban yang awalnya telah dipulangkan ke Indonesia, kembali bekerja ke luar negeri. Kepolisian akhirnya hanya meminta surat keterangan dari Ketua RT/RW dan orang tua korban bahwa korban sudah bekerja lagi. Hal ini mengakibatkan proses penyidikan kasus terhambat bahkan terpaksa dihentikan. Contoh kasus ini menggambarkan kerumitan proses penegakan hukum dalam kasus perdagangan orang. Selain itu, kasus di atas menggambarkan sikap masyarakat yang tidak serius dan tidak konsisten yang menyebabkan terhambatnya penegakan hukum. Narasumber memberikan contoh bagaimana korban dan orang tua korban yang tidak menghadiri pemeriksaan di pengadilan.

Lebih lanjut mengenai perlindungan korban menurut UU PTPPO, dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, Kepolisian wajib memberikan perlindungan. Hal ini mengartikan bahwa perlindungan diberikan setelah korban melaporkan

kasus. Nyatanta, banyak korban perdagangan orang lebih menginginkan mendapat perlindungan namun mereka segan masuk dalam proses pidana karena proses yang lama maupun kekhawatiran dihadapkan dengan pelaku. Menurut narasumber, cara kerja polisi memang memang didasarkan kepada pertanggungjawaban yang jelas, salah satunya adalah berdasarkan laporan korban. Tetapi kepolisian berupaya agar tidak kaku dalam menerapkannya. Beberapa pengalaman penanganan kasus menunjukkan Polda Jawa Barat cukup proaktif. Misalnya memprioritaskan konseling bagi korban anak terlebih dahulu sebelum anak menjalani pemeriksaan oleh kepolisian.

2. Wawancara dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat

Dalam wawancara dengan P2TP2A Provinsi Jawa Barat, penulis mengajukan sejumlah pertanyaan terkait peran P2TP2A Provinsi Jawa Barat dalam perlindungan korban perdagangan orang. Narasumber mengawali wawancara dengan menguraikan sejarah pembentukan P2TP2A Jawa Barat. P2TP2A Jawa Barat dibentuk setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Misi P2TP2A Jawa Barat adalah menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dalam rangka membangun kualitas fisik, spiritual, mental dan intelektual yang

optimal untuk perempuan dan anak, serta memberikan pelayanan dan membangun gerakan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

P2TP2A Jawa Barat mempunyai program kegiatan bagi para korban perdagangan orang seperti penanganan korban oleh relawan, penanganan mediko psikososial serta *visum et-repertum* dilakukan oleh tenaga profesional medis, psikolog. Selain itu, tersedia pula penanganan pasca traumatis secara psikoterapi dan penanganan pasca traumatis secara psikososial oleh tenaga-tenaga ahli seperti psikolog dan rohaniawan. P2TP2A menyediakan rumah aman bagi perempuan dan anak yang terancam keselamatan jiwanya dan membutuhkan tempat tinggal alternatif dalam kurun waktu tertentu. P2TP2A Jawa Barat melaksanakan proses rehabilitasi kepada korban dan mengadakan kursus dan pelatihan-pelatihan agar dengan keterampilan yang dimiliki, korban dapat mandiri dan berdaya.

Narasumber menjelaskan bentuk-bentuk program yang dimiliki P2TP2A Jawa yaitu program pendampingan hukum, membangun jaringan kerja penanganan kasus perdagangan orang, serta pelayanan *hotline service* 24 jam. *Hotline* dibuka bagi para korban kekerasan maupun perdagangan orang yang hendak berkonsultasi atau mengadukan kasus yang dialaminya. P2TP2A Jawa Barat juga membuka konsultasi melalui media massa seperti radio dan surat kabar.

Menurut narasumber, dalam penanganan kasus, P2TP2A Jawa Barat menggunakan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan pekerjaan sosial

yaitu meliputi asesmen, penanganan ke arah pemberdayaan, dsb. Pendekatan medis dilakukan dimana korban yang memang mendapatkan dampak kesehatan akibat perdagangan orang akan ditangani sesuai dengan kebutuhan korban. Ketiga, pendekatan psikologi untuk klien yang mengalami permasalahan psikologis. Pendekatan agama dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga keagamaan untuk mensosialisasikan perdagangan orang dalam perspektif agama agar masyarakat dapat mencegah. Pendekatan hukum dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani kasus. Pendekatan budaya dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Terakhir adalah pendekatan ekonomi dengan mengarahkan perempuan dan anak yang telah menjadi korban dapat mandiri dan berdaya melalui pelatihan.

3. Wawancara dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jawa Barat

Dalam wawancara dengan BP3AKB Provinsi Jawa Barat, penulis mengajukan sejumlah pertanyaan terkait peran institusi tersebut dalam perlindungan korban perdagangan orang. Sebagai upaya pemerintah provinsi Jawa Barat melindungi korban perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemerintah provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat,

dimana salah satu yang diatur adalah penanganan dan rehabilitasi korban. Selain itu, pemerintah provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/Kep.1331- BPPKB/2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini disusul dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat dan Rumah Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (RP3A) Provinsi Jawa Barat.

Narasumber merinci lebih jauh mengenai upaya-upaya lain yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat. Sejak pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jawa Barat pada 1 Januari 2009, pemerintah provinsi Jawa Barat sangat proaktif dalam penanganan masalah perdagangan perempuan. Selain aktif melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat aktif menjalin kerjasama dengan provinsi lain. Narasumber menyajikan sebuah contoh kerja sama antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan pemerintah provinsi Riau. Salah satu yang diatur dalam kerja sama ini adalah mengenai penjemputan korban perdagangan orang. Ketika pemerintah provinsi Jawa Barat melakukan penjemputan korban perdagangan perempuan yang berasal dari Jawa Barat, maka mulai saat penjemputan korban segala biaya penanganan korban tersebut langsung ditanggung oleh APBD pemerintah provinsi Jawa Barat karena APBD pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang tidak mencukupi

untuk menanggung seluruh biaya penanganan korban. Di samping kerja sama dalam penjemputan korban antar provinsi, pemerintah provinsi Jawa Barat juga bekerja sama dengan provinsi-provinsi yang menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* di dalam penyusunan *database*. Penyusunan *database* dilakukan agar jumlah orang yang menjadi korban perdagangan asal Jawa Barat dapat diketahui secara akurat. Melalui pembangunan *database* tersebut, dapat diketahui jumlah korban yang telah mendapat layanan asesmen, jumlah orang yang telah dipulangkan ke kabupaten/kota asal, jumlah korban yang menerima layanan konseling, jumlah korban yang telah menjalani proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan oleh Unit PPA Polda Jawa Barat, jumlah korban yang telah mengikuti pelatihan keterampilan.

Terkait pembiayaan program penanganan korban perdagangan orang, pemerintah provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran Gubernur No.900/71/BPPKB perihal Pengalokasian Biaya Trafficking pada APBD Kab/Kota dan Membentuk Gugus Tugas yang menginstruksikan Bupati dan Walikota di Jawa Barat untuk mengalokasikan APBD kabupaten/kota untuk membiayai penanganan kasus perdagangan orang.

Narasumber menjelaskan lebih jauh mengenai upaya pemerintah provinsi Jawa Barat melindungi korban perdagangan orang. Sebagaimana diatur dalam Perda Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat, pemerintah provinsi Jawa Barat melakukan penanganan korban perdagangan orang melalui penjemputan

korban perdagangan orang, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota asal korban untuk proses pemulangan. Selain itu, ada upaya rehabilitasi korban secara psikis, reintegrasi korban dan pemberdayaan ekonomi. Upaya-upaya ini dilakukan secara koordinatif di bawah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah juga dapat bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mendampingi korban perdagangan orang.

Dalam konteks kerja sama antar provinsi untuk pencegahan dan penanganan perdagangan orang, sejauh ini telah diselenggarakan kerja sama antara 7 (tujuh) pemerintah provinsi yang menjadi anggota Mitra Praja Utama (MPU) yaitu pemerintah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Di antara tujuh pemerintah provinsi ini telah lama berlangsung hubungan kerja sama yang mencakup bidang pemberdayaan perempuan dan bidang-bidang lainnya seperti bidang kesehatan, pendidikan, dsb. Salah satu bidang adalah bidang penanganan dan pencegahan perdagangan orang dan kekerasan terhadap anak. Upaya koordinasi antara tujuh pemerintah provinsi ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan sekali dalam setiap tahun.

Berdasarkan MoU yang telah disepakati, dibuat perjanjian kerja sama yang lebih rinci dan teknis. Dalam perjanjian kerja sama tersebut meliputi hak dan kewajiban yang menentukan aturan dalam implementasi. Kerja sama tersebut mengatur aspek penjemputan korban dimana pemerintah provinsi Jawa Barat akan menjemput korban perdagangan orang yang berasal dari

provinsi Jawa Barat. Dalam kerjasama tersebut, biaya penanganan korban asal Jawa Barat akan ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Barat. Setelah korban dititipkan di rumah aman di provinsi terkait, kemudian akan dijemput oleh pemerintah provinsi Jawa Barat.

Dalam wawancara tersebut, narasumber menyoroti mengenai pentingnya kerja sama antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten di Jawa Barat maupun kerja sama antara pemerintah kabupaten di Jawa Barat. Hal ini didasarkan atas masih adanya persoalan dalam perlindungan korban perdagangan orang. Narasumber menjelaskan mengenai layanan asesmen yang belum dapat mencapai perubahan yang diinginkan yaitu perubahan paradigma korban perdagangan orang. Narasumber menguraikan lebih dalam lagi. Pada umumnya, proses asesmen oleh pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap korban selama 10 (sepuluh) hari di rumah aman ternyata belum mencukupi untuk melakukan perubahan cara pandang korban. Padahal perubahan cara pandang ini sangat substansial dalam mencegah korban agar tidak kembali lagi ke pekerjaan lama atau ke daerah tujuan. Perubahan cara pandang ini dirasakan menjadi problem utama bagi BP3AKB Jawa Barat dalam perlindungan korban. Selain itu, banyak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk gugus tugas pemberantasan perdagangan orang. Dalam kaitan ini, gugus tugas pemberantasan perdagangan orang di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat perlu melakukan berbagai upaya untuk melindungi warganya yang menjadi korban perdagangan orang yang telah dipulangkan oleh pemerintah

provinsi Jawa Barat. Salah satu upaya tersebut adalah pencatatan dan pengawasan terhadap korban yang telah dipulangkan.

Sebagaimana diatur dalam Perda Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat, pemerintah provinsi Jawa Barat wajib memberikan perlindungan korban melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat. Dalam wawancara ini, narasumber menjelaskan lebih dalam mengenai bentuk perlindungan korban yang dilakukan. Salah satu mekanisme dalam upaya perlindungan korban adalah pertemuan koordinasi antara institusi pemerintah daerah di jajaran pemerintah provinsi Jawa Barat, serta pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah kabupaten di Jawa Barat. Pertemuan koordinasi diselenggarakan agar para pihak membuat perencanaan dan penganggaran untuk program perlindungan korban perdagangan orang. Pertemuan koordinasi ini diselenggarakan oleh BP3AKB Jawa Barat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat. Pertemuan koordinasi ini juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan anggota Muspida Provinsi Jawa Barat serta perwakilan dari pemerintah kabupaten yang terdiri dari BP3AKB tingkat kabupaten/kota, P2TP2A tingkat kabupaten/kota dan Polres di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. Selain itu, bentuk perlindungan korban yang dilakukan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat adalah penjemputan korban

perdagangan orang dari daerah tujuan dan dipulangkan ke desa asal, pendampingan hukum bagi korban perdagangan orang, memberikan bantuan modal untuk pemberdayaan ekonomi korban perdagangan orang, dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan korban perdagangan orang. Selain itu, BP3AKB Jawa Barat mendorong pembentukan gugus tugas pemberantasan perdagangan orang di tingkat kabupaten/kota. Saat ini, telah dibentuk gugus tugas pemberantasan perdagangan orang di 18 (delapan belas) kabupaten/kota diantaranya adalah kabupaten Bandung, kabupaten Purwakarta, kabupaten Bekasi, kabupaten Bogor, kabupaten Kuningan, kabupaten Sumedang, kabupaten Cirebon, kabupaten Garut, kabupaten Indramayu, kabupaten Karawang. Selain itu, P2TP2A telah dibentuk di 26 (dua puluh enam) kabupaten/kota di Jawa Barat. Adapun pemerintah kabupaten yang belum membentuk P2TP2A adalah pemerintah kabupaten Pangandaran.

Narasumber menyoroti proses penjemputan korban yang telah dilakukan selama ini. Pemulangan dan penjemputan korban perdagangan orang dilakukan dengan menggunakan anggaran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Jawa Barat. Dalam hal ini, BP3AKB Jawa Barat terlibat langsung dalam penjemputan. Penjemputan ini dilakukan bila ada laporan dari keluarga korban atau ada berita dari daerah tujuan mengenai korban perdagangan orang melalui komunikasi antar Polda atau laporan yang diterima langsung oleh Polda Jawa Barat. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Jawa Barat

kemudian melakukan penjemputan terhadap korban dan merujuk korban untuk didampingi dan tinggal sementara di *shelter* yang dikelola P2TP2A Jawa Barat. Pendampingan korban di *shelter* akan dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk proses hukum dan *medical check up*. Keseluruhan proses pendampingan di *shelter* memakan waktu maksimal 10 hari. Durasi pendampingan korban di *shelter* selama 10 hari dirasakan cukup karena korban umumnya ingin segera dipulangkan ke desa asal mereka. Bagi korban yang ingin pulang sebelum waktunya maka terlebih dahulu harus ada rekomendasi psikolog. Setelah itu, korban dipulangkan ke daerah asalnya melalui *shelter* ataupun instansi yang berwenang di kabupaten/kota. Prosedur pemulangan seperti itu penting karena pemantauan lanjutan terhadap korban yang bersangkutan dilimpahkan kepada pemerintah kotakabupaten/kota daerah asal korban. Pemantauan ini penting agar korban berdaya dan tidak kembali lagi menjadi korban dalam kasus perdagangan orang. Umumnya di antara korban, masih ada yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban. Menurut narasumber, implikasinya tentu berbeda karena untuk mereka yang merasa menjadi korban akan merasa traumatik.

Terkait dengan hak korban atas restitusi, narasumber menjelaskan bahwa Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Jawa Barat pun mendapat wewenang dalam implementasi restitusi. Kewenangan ini dilaksanakan oleh bidang penegakan hukum yang dikoordinir oleh Polda Jawa Barat. Dalam penanganan hukum, Polda Jawa Barat berkoordinasi dengan jajaran Kejaksaan dan Pengadilan di Jawa Barat. Gugus Tugas

Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Jawa Barat sedang membuat kajian tentang proses hukum kasus perdagangan orang. Dijelaskan lagi oleh narasumber, inti dari rasa keadilan bagi korban diwujudkan dalam proses hukum yang diakhiri dengan pemberian hak restitusi. Namun belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ada sejumlah faktor penyebab, salah satunya adalah lemahnya koordinasi antara jaksa dan hakim. Kedua, lemahnya koordinasi tidak didukung oleh operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Jawa Barat. Sehingga kegiatan dibiayai oleh anggaran dari setiap institusi anggota Gugus Tugas. Padahal di sisi lain, ada keinginan dari institusi seperti Polda Jawa Barat agar mendapat dana dari Gugus Tugas ketika menyelenggarakan proses penegakan hukum dan perlindungan korban. Hal ini menggambarkan pula kendala berupa tidak adanya kesepahaman mengenai anggaran. Selain itu, belum adanya kesamaan persepsi dan koordinasi yang lemah antara jaksa dan hakim turut menjadi kendala dalam upaya perlindungan korban, khususnya pemberian restitusi.

Selain bentuk-bentuk perlindungan korban yang telah diuraikan, narasumber menambahkan pula bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri terkait penjemputan korban dari luar negeri. Tetapi sebenarnya akan lebih tepat kami menjajaki dengan Gugus Tugas Nasional. Selain itu, pemerintah provinsi Jawa Barat sedang menyusun rancangan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimandatkan oleh Perda

Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan
Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat.